

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah tentang pemberdayaan sudah banyak dibahas oleh beberapa pakar ahli. Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan dan ditambah dengan awalan “ber” yang memiliki makna mempunyai daya. Dengan kata lain, arti kata berdaya adalah memiliki tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*” yang berarti membantu memberdayakan klien guna mengambil keputusan secara tepat dan bisa menetapkan tindakan yang akan dilaksanakan terkait dengan diri mereka sendiri. Dalam melakukan tindakan tersebut termasuk meminimalisir efek hambatan pribadi dan dampak sosial. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan rasa percaya diri dengan kemampuan daya masyarakat tersebut.

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang memiliki minat dan budaya yang sama, serta sistem yang khusus di masyarakat. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir dikarenakan memiliki niat dan tujuan yang sama. Menurut J.L Gillin, masyarakat adalah sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Max Iver juga memberikan pandangannya tentang masyarakat yaitu suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling membantu meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem hubungan sosial yang kompleks dan terus berkembang dari relasi sosial yang ada. Unsur-unsur penting di dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa banyak orang yang hidup bersama itu. Paling sedikit berjumlah dua orang. Hidup bersama dalam masyarakat berlangsung dalam jangka waktu cukup lama.

- b. Adanya persepsi di antara para anggota bahwa mereka adalah satu kehidupan bersama. Maksudnya, adanya solidaritas antara warga dan kelompok manusia itu. Kelompok manusia tersebut disebut suatu kehidupan bersama. Artinya, mereka memiliki budaya yang sama dan anggota kelompok terikat satu sama yang lain.¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri berupa penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, bakat dan daya pikir, serta kinerja atau tindakan yang lebih baik dari sebelumnya.²

Menurut Subejo dan Supriyanto (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk memudahkan masyarakat lokal dalam perencanaan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal mereka melalui tindakan kolektif dan jaringan, yang pada akhirnya tercapainya otonomi serta kemandirian ekonomi, lingkungan/ekologi, dan sosial.³

Pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan. Proses perubahan sosial yang ada di masyarakat akan memberikan hasil dampak kepuasan dari masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan mendiskusikan tentang bagaimana individu, kelompok, serta komunitas mencoba untuk membuat pilihan tentang tujuan masa depannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Masyarakat secara mandiri dapat mengolah kebutuhan mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Berdasarkan kesamaan masalah dalam kehidupan masyarakat, kesadaran akan solidaritas sangat

¹ Dedeh Maryani, Ruth Roseline E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1-4.

² Dwi Iriani Margayaningsih. *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa*. (2018), 78.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 44, No. 2, (2010), 7.

efektif dengan identitas yang bersatu memperlihatkan kemampuan untuk berubah yang begitu kuat.⁴

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pokok dalam pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan kuasa dalam masyarakat, terutama kelompok rentan yang tidak berdaya, baik disebabkan karena kondisi internal (persepsi seseorang) maupun karena kondisi/keadaan.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112). Tujuan pemberdayaan dilakukan melalui beberapa perbaikan, antara lain:

- a. Perbaikan Pendidikan (*better education*), artinya pemberdayaan yang lebih mengarah untuk pendidikan yang lebih maju dan berkembang secara baik. Terutama peningkatan pendidikan nonformal dimana sistem penguatan dapat membangun semangat belajar tanpa mengenal batas waktu dan usia.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), artinya ketika semangat belajar terus tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas. Aksesibilitas tersebut meliputi beberapa hal terutama aksesibilitas terhadap ketersediaan sumber informasi/inovasi, sumber keuangan, pemasok produk, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*), artinya setelah melalui perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dari berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dengan baik. Diharapkan dapat menciptakan perbaikan tindakan-tindakan menjadi lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*), artinya seiring dengan perbaikan tindakan-tindakan yang dilakukan, dengan harapan dapat memperbaiki keorganisasian/kelembagaan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan jaringan kemitraan usaha, sehingga dapat menghasilkan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam masyarakat.

⁴ Mohamad Teja. *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Untuk Masyarakat Pesisir*. Aspirasi Vol. 6, No. 1, (2015), 66.

- e. Perbaiki usaha (*better business*), artinya setelah melakukan perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan/kegiatan, perbaikan kelembagaan, yang bertujuan untuk memperbaiki bisnis atau usaha yang dilakukan.
- f. Perbaiki pendapatan (*better income*), artinya melalui perbaikan bisnis atau usaha yang dilakukan, dengan harapan dapat memperbaiki pendapatan yang didapatkan, baik dari segi pendapatan keluarga dan masyarakat.
- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*), artinya faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan yang didapatkan memicu adanya kerusakan lingkungan dalam masyarakat. Peran perbaikan pendapatan disini dapat memperbaiki lingkungan menjadi lebih sehat baik dari segi fisik maupun sosial.
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*), artinya perbaikan situasi kehidupan yang layak dan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Terciptanya kehidupan yang baik tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat.
- i. Perbaiki masyarakat (*better community*), artinya situasi kehidupan yang layak, dengan dukungan lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, dengan harap dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik.⁵

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut penuturan Dahana dan Bhatnagar (1980) bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:⁶

- a. Kerja sama dan partisipasi, maksudnya adalah partisipasi masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk selalu bekerja sama secara optimal dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat dan juga program-program pemberdayaan yang sudah dirancang.

⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (Makassar: De La Macca, 2018), 12-14.

⁶ Sukei, Handini, dan Hartati Kanty Astuti. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, (Surabaya, 2019), 44-46.

- b. Menggunakan metode yang tepat, maksudnya adalah menerapkan metode dalam proses pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan melihat kondisi sarannya, baik dari lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya.
- c. Demokratis, maksudnya adalah upaya pemberdayaan yang mengutamakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya untuk setiap ilmu alternatif yang akan dijalankan. Dengan kata lain, demokrasi di negeri ini tidak hanya mencakup tawar-menawar ilmu pengetahuan alternatif tetapi juga penerapan strategi pemberdayaan dan prosedur pengambilan keputusan yang tepat untuk masyarakat yang dituju.
- d. Minat dan kebutuhan, maksudnya adalah pemberdayaan ini lebih mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat sarannya. Dalam artian secara mendalam adalah mengetahui minat dan kebutuhan individu dan anggota masyarakatnya secara pasti, mengetahui kebutuhan yang dapat terpenuhi dilihat dari ketersediaan sumberdaya, serta mengetahui minat dan kebutuhan yang menjadi prioritas utama agar terpenuhi terlebih dahulu.
- e. Kelompok masyarakat bawah, maksudnya adalah pemberdayaan dikatakan efektif apabila mampu mengikutsertakan organisasi atau kelompok masyarakat kelas bawah, sejak dari setiap keluarga/kerabat.
- f. Keragaman budaya, maksudnya adalah dalam proses pemberdayaan harus mengetahui keragaman budaya yang ada. Rencana pemberdayaan tersebut harus disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di sisi lain, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap area/wilayah biasanya akan menghadapi hambatan yang terkait dengan keragaman budayanya.
- g. Terarah dan spesialis, maksudnya adalah peran penyuluh sangat dibutuhkan disini guna menjalankan program-program kegiatan khusus meskipun masih berhubungan dengan kegiatan pertanian. Pada umumnya, para penyuluh telah mendapatkan pelatihan

- khusus dalam segala hal yang sesuai dengan kemampuannya sebagai penyuluh.
- h. Belajar sambil bekerja, maksudnya adalah pemberdayaan lebih difokuskan untuk masyarakat bisa belajar dari pengalaman yang selama ini mereka dapatkan. Dengan kata lain, pemberdayaan lebih dari sekedar seperangkat ide teoretis, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memunculkan ide-ide baru dan belajar dari kegiatan implementasi program yang sebenarnya.
 - i. Perubahan budaya, maksudnya adalah kegiatan pemberdayaan biasanya akan menimbulkan perubahan budaya di masyarakat. Untuk menghindari konflik antar budaya, maka proses pemberdayaan harus dilakukan dengan benar dan hati-hati. Oleh karena itu, seorang penyuluh harus survei terlebih dahulu tentang adat istiadat setempat serta nilai-nilai budaya lokal yang ada di masyarakat tersebut.
 - j. Kepemimpinan, maksudnya adalah penyuluh tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi harus bisa mengembangkan kepemimpinan. Dalam hal ini, penyuluh diharapkan mampu memberdayakan pemimpin lokal baik dengan menumbuhkan pemimpin baru maupun memanfaatkan pemimpin yang sudah ada.
 - k. Segenap keluarga, maksudnya adalah penyuluh harus lebih fokus pada keluarga sebagai unit sosial.
 - l. Kepuasan, maksudnya adalah pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan kepuasan. Dengan adanya kepuasan maka akan sangat berpengaruh untuk keikutsertaan sasaran untuk program-program pemberdayaan yang akan datang.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (1987:63), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan atau langkah yang akan dilakukan, diantaranya:⁷

⁷ Dedeh Maryani, Ruth Roseline E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat...*, 13-14.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, ada dua langkah yang harus dikerjakan yaitu; *pertama*, menyiapkan agen pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat (*community worker*), dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada umumnya dilaksanakan secara nondirektif.

b. Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahap ini, agen pemberdayaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi permasalahan kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan kata lain, program yang dilaksanakan tepat sasaran, artinya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Perencanaan alternatif Kegiatan atau Program

Pada tahap ini, agen pemberdayaan bertugas sebagai agen perubahan "*exchange agent*" secara partisipatif untuk mengikutsertakan masyarakat untuk berfikir tentang permasalahan yang mereka alami dan cara untuk mengatasinya. Dalam hal tersebut, masyarakat dituntut untuk membuat beberapa alternatif program serta kegiatan yang akan diterapkan di masyarakat. Agar program/kegiatan upaya pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan efisien, beberapa alternatif tersebut harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya sehingga nantinya dapat dipilih alternatif program yang sesuai.

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Agan pemberdayaan, pada tahap ini berkontribusi pada perumusan, penentuan program atau kegiatan yang akan mereka lakukan, serta strategi yang akan mereka gunakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Agen perubahan juga membantu masyarakat menuangkan pemikiran dan ide mereka ke dalam tulisan, terutama untuk proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian, penyandang dana tersebut akan memahami maksud dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

e. Tahap Implementasi Kegiatan atau Program

Pada tahap ini, peran masyarakat sebagai kader sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesinambungan kegiatan atau program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar agen pemberdayaan dan masyarakat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi miskomunikasi saat di lapangan.

f. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini diharapkan keberhasilan yang telah dicapai oleh program ini akan terlihat jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui batasan-batasan pada periode selanjutnya dapat diperkirakan untuk mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan dimana hubungan secara resmi terputus dari masyarakat sasaran. Dengan kata lain, masyarakat yang diberdayakan telah mampu untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik dan menjamin kelangsungan hidup mereka kedepannya.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa menerapkan strategi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, yaitu:⁸

- a. Pemungkinan, artinya membangun suasana atau lingkungan di mana kemampuan masyarakat dapat berkembang dengan lebih ideal. Proses pemberdayaan harus bisa membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur budaya dan struktur yang menjadi penghambatnya.
- b. Penguatan, artinya memperkuat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi segala kebutuhannya. Pemberdayaan harus bisa mengembangkan seluruh kemampuan atau ketrampilan serta kepercayaan dalam

⁸ M.J. Maspaitela, Nancy Rahakbauwi. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerjaan Sosial. Aspirasi*, Vol. 5 No. 2, (2014), 162.

- diri masyarakat untuk mendukung kemandirian mereka sendiri.
- c. Perlindungan, artinya untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara kelompok kuat dan lemah, mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, dan melindungi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari penindasan oleh kelompok kuat. Segala bentuk dominasi dan diskriminasi yang mutlak merugikan rakyat jelata atau kelas bawah harus diberantas melalui program pemberdayaan.
 - d. Penyokongan, artinya membantu masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab dan peranannya dalam kehidupan dengan memberikan pengarahan dan bimbingan. Pemberdayaan harus mampu menyokong daerah setempat agar daerah tersebut tidak terperosok dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpuruk.
 - e. Pemeliharaan, artinya memelihara atau menjaga kondisi yang kondusif demi keseimbangan dalam distribusi kekuasaan diantara kelompok masyarakat yang beragam. Pemberdayaan harus dapat menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang atau masyarakat mendapatkan kesempatan berusaha yang sama.

6. Pemberdayaan dalam Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pemberdayaan masyarakat dalam ajaran agama Islam mempunyai 3 prinsip utama, meliputi: Prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan derajat.⁹ Prinsip-prinsip tersebut akan dijabarkan dibawah ini.

a. Prinsip *ukhuwwah* (Persaudaraan)

Dalam bahasa Arab, makna *ukhuwwah* mempunyai arti persaudaraan. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa antar sesama kaum muslimin-muslimat mempunyai hubungan sosial yang erat dan saling bersaudara. Rasa

⁹ Ulfy Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 1, (2019), 34-36.

persaudaraan tersebut itulah yang akan membentuk rasa empati dan silaturahmi dalam masyarakat bisa terjalin dengan baik. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-Hujurat: 10)¹⁰

Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* menjadi motif dasarnya segala upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Rasulullah SAW mempunyai visi menjadikan masyarakat umat Islam bisa saling membantu dan saling menolong dalam hal kebaikan, serta saling mendukung satu sama lain ketika sedang mengalami kesulitan.

b. Prinsip *ta'awun*

Dalam bahasa Arab, *ta'awun* mempunyai makna tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 2)¹¹

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

¹¹ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Prinsip *ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membantu individu/masyarakat yang membutuhkan pertolongan serta bimbingan/nasehat. Upaya pemberdayaan harus dimulai dengan niat yang ikhlas untuk menolong individu/masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal tersebutlah yang mendorong terbentuknya persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*.

c. Prinsip Persamaan Derajat

Prinsip ini mempunyai makna bahwa adanya persamaan derajat antar umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

خَبِيْرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S. Al Hujurat: 13)¹²

Ayat diatas menekankan kesetaraan derajat antar manusia, dan menyakinkan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa seseorang. Ayat diatas juga menegaskan bahwa antara yang miskin dan kaya, semuanya sama dihadapan Allah. Serta tidak menimbulkan perpecahan, namun

¹² Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 13, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

menjadi wasilah untuk bisa saling membantu dan tolong menolong antar sesama.

B. Hutan Kemasyarakatan

1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Pembangunan kehutanan merupakan terciptanya kelestarian hutan yang berperan sebagai sistem penyangga dalam kehidupan, meningkatkan perekonomian rakyat, mendukung perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upayanya untuk pembangunan kehutanan. Salah satu misi utama dalam pembangunan hutan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan menggunakan perhutanan sosial, khususnya di area kawasan hutan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan cara memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat sekitar maupun di dalam hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik-konflik kehutanan dengan memberikan akses dan pengelolaan terkait klaim masyarakat dalam menguasai kawasan hutan. Dalam konteks ini, Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menjamin kelestarian serta transformasi ekonomi dan budaya untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.¹³

Hutan kemasyarakatan adalah kegiatan penanaman, pemanenan dan pengolahan pohon yang sistem budidayanya dengan salah satu atau dikombinasikan dengan tanaman perdagangan atau industri, tanaman pangan, tanaman pakan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi secara individu atau kolektif untuk

¹³ DLHK Aceh, Hutan Kemasyarakatan, <https://dlhk.acehprov.go.id/program-utama/hutan-kemasyarakatan/> (Diakses pada 13 Januari 2023).

kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan guna kebutuhan lingkungan.¹⁴

2. Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) bagi masyarakat, pemerintah, fungsi hutan dan restorasi habitat.¹⁵

- a. Manfaat Hutan Kemasyarakatan bagi masyarakat, antara lain:
 1. Pemberian izin mengelola atas Hutan Kemasyarakatan menjamin akses untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dapat memastikan untuk dapat berinvestasi di daerah kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka sendiri.
 2. Dari hasil pemanfaatan hasil dari sumber daya hutan yang melimpah akan menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat. Keanekaragaman tanaman yang harus ditanam sebagai bagian dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan menjadi kalender panen bagi petani yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
 3. Dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan akan menjadikan hubungan yang harmonis dan dialogis baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Komunikasi yang baik dan harmonis antar pihak muncul karena kegiatan Hutan Kemasyarakatan efektif untuk mendorong diskusi dan komunikasi.
 4. Terlindunginya ketersediaan air yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian dan kegiatan rumah tangga. Hal tersebut merupakan dampak dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui

¹⁴ Iga Salsabila. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hkm Di Kampong Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima*, (Makassar: UIN Alauddin, 2020), 29. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> pada 17 Januari 2023, pukul 16.00.

¹⁵ Yulia Neta, Hari Kaskoyo, dan Dian Kagungan. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri"*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019), 6-8.

- penjagaan sumber-sumber mata air yang berasal dari hutan.
5. Melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan akan terciptanya peningkatan penghasilan non tunai (berbentuk barang atau innatura) dalam bentuk papan dan pangan.
- b. Manfaat Hutan Kemasyarakatan bagi pemerintah, antara lain:
1. Melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi hutan untuk masyarakat yang lebih sejahtera.
 2. Kegiatan teknis pada kawasan Hutan Kemasyarakatan yang mengharuskan kelompok/organisasi untuk melaksanakan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (membuat terasiring, rorak, guludan, dan lain-lain), dan melaksanakan penanaman menggunakan sistem MPTS yang meningkatkan fungsi hutan.
 3. Kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui rehabilitasi yang dilaksanakan secara swadana dan swadaya secara tidak langsung memberikan sumbangan dari masyarakat kepada pemerintah.
 4. Adanya penegakan hukum dan ketertiban di kawasan Hutan Kemasyarakatan (berlandaskan aturan dan mekanisme dari kerja kelompok).
 5. Adanya kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak yang positif dalam pengamanan hutan, seperti mengurangi penebangan liar, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kegiatan pengamanan hutan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu program kerja dari masing-masing kelompok tani hutan.
- c. Manfaat Hutan Kemasyarakatan terhadap fungsi hutan dan restorasi habitat, antara lain:
1. Terciptanya keanekaragaman tanaman atau tumbuhan yang melimpah (tajuk rendah, sedang, tinggi).

2. Blok perlindungan terjaga dengan baik yang dikelola oleh kelompok pemegang izin Hutan Kemasyarakatan atau Kelompok Tani Hutan yang diatur menggunakan aturan main kelompok.
3. Fungsi ekologis dan hidrologis terjaga dengan baik, dengan menggunakan pola teknik penanaman campuran dan teknis konservasi lahan yang dijalankan.
4. Terjaganya kekayaan alam berupa flora dan fauna beserta habitatnya yang telah ada sebelumnya melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

C. Kelompok Tani Hutan

1. Pengertian Kelompok Tani Hutan

Menurut penuturan Purwanto (2007), kelompok tani merupakan kumpulan para petani-nelayan yang dilandasi oleh kesamaan, keserasian, lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kumpulan petani, peternak, dan pekebun membentuk kelompok tani dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha para anggota itu sendiri. Kelompok-kelompok ini terbentuk atas dasar kepentingan bersama, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya), dan persahabatan.¹⁶

Jadi, Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah sekelompok atau sekumpulan petani yang dibentuk dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk mengelola di bidang kehutanan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan dengan tujuan menjaga hutan tetap lestari. Kelompok Tani Hutan (KTH) diartikan sebagai wadah belajar bagi para petani untuk saling berinteraksi satu sama lain mengenai hutan kemasyarakatan, sebagai unit kerjasama, produksi, pengolahan, pemasaran, dan unit pendukung lainnya.

¹⁶ Andi Ratu Maulana, *Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Tembarang Kecamatan Pengrang Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) , 6. Diakses melalui <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> pada 18 Januari 2023, pukul 21.00.

2. Fungsi dan Tujuan Kelompok Tani Hutan

Menurut Mosher (1968) dalam Djiwandi (1994), kelompok tani berfungsi sebagai poin penting untuk mengimplementasikan konsep hak-hak petani dan menerjemahkannya dalam suatu kebijakan, strategi, dan program yang sesuai dengan cara keseluruhan dan memberikan suatu landasan untuk transformasi dan pengembangan menjadi langkah-langkah operasional. Kelompok tani berperan penting sebagai wadah untuk memajukan sektor perekonomian di bidang pertanian, sehingga dapat memfasilitasi pembangunan pertanian menjadi lebih maju.¹⁷

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Di zaman modern saat ini, konsep kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, air minum bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta mempunyai pekerjaan yang layak agar dapat membantu kualitas hidup seseorang sehingga memiliki kesejahteraan ekonomi yang mendorong pemerataan dan kesejahteraan ekonomi secara adil terhadap sesama warga negara yang lainnya.¹⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap

¹⁷ Sri Nuryanti dan Dewa, *Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian*, (Bogor: 2011), 117.

¹⁸ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet 5, 62-63.

warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁹

Dilihat dari definisinya, istilah kesejahteraan sosial dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, antara lain:

- a. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dimana kesejahteraan sosial mengindikasikan bahwa keadaan sejahtera secara umum mencakup keadaan jasmani, rohani, dan sosial serta tidak sekedar penataan dan pengentasan penyakit sosial tertentu.
- b. Kesejahteraan sosial adalah pelayanan perlindungan sosial yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berusaha memenuhi kebutuhannya di berbagai bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, kesehatan, waktu senggang, taraf kehidupan, serta hubungan-hubungan sosial.
- c. Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu. Kesejahteraan sosial berperan sebagai ilmu yang masih kaitannya dengan kebijakan sosial yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal ini, sistem kesejahteraan sosial terdiri dari upaya dan struktur terorganisir dengan baik guna mencapai kesejahteraan sosial dengan 4 bagian yang saling berhubungan, seperti isu-isu sosial, tujuan-tujuan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta program-program kesejahteraan sosial masyarakat.²⁰

Kebahagiaan adalah sesuatu yang dialami dan dapat dirasakan setiap orang secara berbeda yang menjadi tolok ukur tingkat kebahagiaan adalah suatu hal yang bersifat subyektif. Berkaitan dengan hal tersebut, kebahagiaan menjelaskan tentang indikator kesejahteraan secara subyektif yang dipakai untuk melengkapi indikator obyektif. Dari berbagai penelitian mengenai indeks

¹⁹ Nur Zaman, dkk. *Sumber Daya Dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 27.

²⁰ Fanni Febrianti. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 16, Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id> pada 28 Januari 2023, pukul 19.30.

kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan subjektif dengan melihat komponen kebahagiaan atau kepuasan hidup serta emosi yang bersifat positif. Bila menggunakan indeks kebahagiaan sebagai bahan pengambilan keputusan publik, kepuasan hidup digunakan sebagai salah satu komponen dalam menentukan kebahagiaan seseorang.²¹

Aspek-aspek spesifik yang sering dipakai untuk dijadikan tolok ukur dalam penentuan kesejahteraan masyarakat, antara lain:²²

- a. Kependudukan, yang mencakup mengenai jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran, kepadatan populasi/penduduk, migrasi, dan fertilitas (tingkat kelahiran).
- b. Kesehatan, yang mencakup mengenai angka kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, usia harapan hidup, serta angka kesakitan), ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta kondisi kesehatan ibu dan balita.
- c. Pendidikan, yang mencakup mengenai keahlian dalam baca tulis, taraf partisipasi sekolah dan sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Ketenagakerjaan, yang mencakup mengenai angka partisipasi angkatan kerja, peluang kerja, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jam kerja, serta pekerjaan anak.
- e. Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- f. Perumahan dan Lingkungan, yang mencakup mengenai kualitas tempat tinggal, sarana dan prasarana lingkungan tempat tinggal, serta kebersihan lingkungan di wilayah tempat tinggal.
- g. Sosial Budaya, yang mencakup mengenai kesempatan untuk mendapatkan informasi/data dan hiburan, serta kegiatan yang berkaitan dengan sosial budaya.

²¹ Amirus Shodiq. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. (Kudus: IAIN Kudus, 2015), 385. Diakses melalui <https://journal.iain.kudus.ac.id> pada 28 Januari 2023, pukul 20.00.

²² Amirus Shodiq. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*.,.,., 387-388.

2. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tujuan dari upaya pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adalah sebagai bentuk upaya guna mengembangkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik secara menyeluruh. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi sasaran dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat di semua tingkat sosial serta ekonomi dengan menyediakan berbagai layanan sosial dan jaminan sosial, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan dan sangat rentan membutuhkan perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan pemberdayaan dengan membangun struktur ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia.
- c. Meningkatkan kebebasan dengan memperluas aksesibilitas dan memberikan pilihan kesempatan untuk aspirasi, kemampuan, serta standar kemanusiaan.²³

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), indikator yang dipakai untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat ada 8, yaitu:

- a. Pendapatan;
- b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga;
- c. Keadaan atau kondisi tempat tinggal;
- d. Fasilitas tempat tinggal;
- e. Kesehatan anggota keluarga;
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan;
- g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan; serta
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

E. Penelitian Terdahulu

Pertanian terdahulu digunakan sebagai bentuk perbandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya maka penelitian terdahulu harus dimasukkan dalam penelitian.

²³ Fanni Febrianti. *Analisis Tingkat Kesejahteraan.....*,17-18.

Judul Penelitian: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) SUKOBUBUK REJO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)

Penulis melakukan langkah review terhadap beberapa hasil eksplorasi yang dihubungkan dengan masalah yang akan penulis teliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikumpulkan oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Garjita, Indah Susilowati, dan Tri Retnaningsih Soeprbowati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi*”. Hasil penelitian ini adalah tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Tingkat partisipasi langsung dan tidak langsung dari kelompok tani hutan dalam pengelolaan TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi) saat ini masih termasuk kategori cukup baik. Sedangkan tingkat persepsi masyarakat terhadap TNGM secara umum sudah bisa dikatakan baik.²⁴ Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan untuk membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani hutan di daerah mereka sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada beberapa seperti: *pertama*, Perbedaan penelitian terdahulu ini menggunakan metode analisis statistis deskriptif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. *Kedua*, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian dahulu ini cakupannya lebih luas karena membahas strategi-strategi pemberdayaan KTH. Sedangkan penelitian yang difokuskan penulis pada penelitian ini adalah mengetahui sistematika

²⁴ Putu Garjita, Indah Susilowati, dan Tri Retnaningsih Soeprbowati. *Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi*. Jurnal Ekosains, Vol. 6.No. 1, 2014, 59.

- pemberdayaan KTH, peran KTH, serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Herawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman-hurun Kabupaten Pesawang Lampung*”. Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani SHK Lestari adalah sudah termasuk kategori kelompok yang sudah mandiri dengan dinamika kelompok yang kuat, terarah, dan tujuan kelompok sudah jelas.²⁵ Persamaan dari kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, memiliki subjek yang sama yaitu kelompok tani hutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada beberapa seperti: *Pertama*, lokasi penelitian terdahulu ini berada di Kawasan Hutan Raya Wan Abdurrahman-hurun Kabupaten Pesawanan Lampung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Sokobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. *Kedua*, penelitian terdahulu ini mempunyai penjabaran yang luas seperti: menggunakan analisis SWOT, upaya pemberdayaan, faktor-faktor eksternal, evaluasi maktriks internal dan eksternal. Sedangkan penelitian yang difokuskan penulis pada penelitian ini adalah mengetahui proses pemberdayaan KTH, peran KTH, serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Iga Salsabila (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima*”. Hasil penelitian ini adalah proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara reboisasi di lahan pertanian, penanaman tanaman pangan seperti padi dan menanam tanaman komoditas ekspor, seperti jagung dan kacang tanah dan

²⁵ Eka Lestari, *Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman-hurun Kabupaten Pesawang Lampung*. Jurnal Agribisnis Terpadu, Vol. 10 No. 1, 2017, 39.

jambu mete.²⁶ Persamaan dari kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu melalui pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penelitian terdahulunya. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui hutan kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran dan proses pemberdayaan masyarakat petani melalui KTH Sukobubuk Rejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani khususnya di Desa Sukobubuk.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulansari, Zainal Abidin, dan Hafizianor (2022) yang berjudul “*Strategi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan Di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Selat Sebuku*”. Hasil penelitian ini adalah peran Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku dikategorikan tinggi. Analisis SWOT yang diterapkan menjelaskan bahwa kondisi pengelolaan hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku termasuk dalam kuadran III (bertahan) sehingga strategi yang dilaksanakan adalah *turn around strategy* (strategi putar balik) artinya strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perbaikan terhadap kondisi pengelolaan yang ada sekarang melalui pencarian metode lain agar pengelolaan menjadi lebih efisien dan pekerjaan lebih mudah.²⁷ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah kedua penelitian ini mempunyai kesamaan dalam meneliti tentang tingkat peran kelompok tani hutan dalam upaya pengelolaan, menjaga kelestarian hutan dan melakukan reboisasi agar hutan tersebut tidak tandus atau kering. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada beberapa seperti: *Pertama*, penelitian terdahulu ini

²⁶ Iga Salsabila, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hkm...*, 92.

²⁷ Dewi Wulansari, Zainal Abidin, dan Hafizianor, *Strategi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan Di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Selat Sebuku*. *Jurnal Hutan Tropis*, Vol. 1o No. 2, 2022, 175.

menggunakan analisis SWOT. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang proses pemberdayaan KTH, peran KTH, serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan. *Kedua*, terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Selat Sebuku Kabupaten Kotabaru. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Sokobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

F. Kerangka Berpikir

Dasar pemikiran yang memadukan antara teori, data observasi, dan kajian literatur dikenal sebagai kerangka berpikir dan nantinya akan menjadi landasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam menjelaskan konsep penelitian yang akan dilakukan, kerangka berpikir ini dibuat karena menjadi landasan dalam penelitian.

Dilihat dari kerangka berpikir ada tiga macam, antara lain: kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka teori adalah jenis kerangka yang tidak hanya menjelaskan fenomena yang dipelajari tetapi juga mendukung teori yang dijadikan landasan. Kerangka operasional adalah jenis kerangka kerja yang menggunakan konsep-konsep yang dipelajari untuk menjelaskan variabel-variabel yang diangkat oleh peneliti. Suatu jenis kerangka yang disebut kerangka konseptual berisi asumsi-asumsi teoritis yang nantinya akan digunakan untuk mengistilahkan objek dalam penelitian..

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk Rejo di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati memiliki program pemberdayaan melalui program-program pelatihan serta melakukan pendampingan serta penyuluhan bagi masyarakat petani. Peran Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk Rejo yaitu. *Pertama*, kelompok tani juga berperan penting dalam pengelolaan kawasan hutan. *Kedua*, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat petani agar mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang pertanian. *Ketiga*, untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat khususnya para petani dengan tujuan untuk mempermudah para petani

dalam mendapatkan bibit, peralatan pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tak jarang kita menemui adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang kita hadapi. Adapun pencarian solusi yang bisa dilakukan menjadi suatu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Setelah menemukan upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk Rejo dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara maksimal. Adapun uraian untuk penggambaran skema tersebut, adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

